

Mendagri: Banyak Kepala Daerah Tidak Paham Posisi Keuangannya

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, banyak kepala daerah yang tidak paham dengan posisi keuangan di daerah yang mereka pimpin.

Tito mengungkapkan hal ini ketika menyortir banyaknya dana anggaran belanja pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. Meski ia memahami banyak proyek pemerintahan daerah yang jatuh tempo pembayarannya setelah proyek rampung.

Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya bisa mengatur belanja operasional sehingga tidak seluruhnya direalisasi pada akhir tahun.

"Nah ini mohon betul kepada rekan-rekan kepala daerah untuk memberi atensi ini, karena biasanya mohon maaf, saya berapa kali datang ke daerah-daerah, teman-teman kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi keuangannya," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (2/6).

Berdasarkan data yang ia miliki, total simpanan pemerintah daerah per 30 April 2022 mencapai Rp 65,59 triliun untuk pemerintah provinsi dan Rp 125,98 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.

Tito mengatakan, ban-

yak dari kepala daerah yang hanya memedulikan eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah yang mereka pimpin. Padahal, kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah bisa berjalan secara efektif.

"Realisasi belanjanya, realisasi pendapatannya (tidak paham), yang penting programnya kepala daerah sudah dilaksanakan. Sudah itu saja yang menjadi fokus. Nah yang menguasai itu adalah dari BPKAD, Bapenda, dan Sekda, tiga ini biasanya yang ngeri," ucap Tito.

Ia pun meminta agar kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala Bappeda membuat tahapan realisasi belanja agar setiap tahun ada dana yang beredar di masyarakat.

Hal tersebut menurutnya penting untuk mendorong perekonomian di daerah di tengah pemulihan setelah pandemi Covid-19.

"Yang punya uang banyak kan negara, agar ada uang yang beredar di masyarakat, kalau ada uang yang beredar di masyarakat maka akan memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membentuk persentase pertumbuhan ekonomi," jelas Tito. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANT



RAKORNAS KEMENDAGRI DENGAN TASPEN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama Direktur Utama Taspen A.N.S Kosasih (ketiga kanan), Komisaris Utama Taspen Suherdi Alius (kedua kanan), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (kanan), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A Fatonni (kiri), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas (kedua kiri) meresmikan Keuangan Daerah (Keuda) Digital saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 Kemendagri di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/6). Kemendagri bersinergi dengan Taspen dalam rakornas yang mengusung tema Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Penganugerahan Realisasi APBD serta peluncuran Keuangan Daerah (Keuda) Digital.

Berbeda dengan AKBP Brotoseno, Kejaksaan Agung Pecat Jaksa Pinangki

Pinangki diberhentikan tidak hormat baik sebagai jaksa dan ASN. Sementara AKBP Brotoseno tetap jadi polisi aktif. Padahal keduanya sama-sama dihukum karena kasus korupsi.

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegakkan, tersangka kasus korupsi yang merupakan mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari, telah dipecat sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil (PNS) sejak Agustus 2021.

Perlakuan Kejagung terhadap Pinangki, berbeda dengan Polri yang tidak memecat anggota Polri, AKBP Raden Brotoseno, meski pun telah

dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi pada 2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis (2/6), menyatakan, Pinangki diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai jaksa dan PNS Kejaksaan Agung RI.

"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai

jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI sejak Keputusan Jaksa Agung RI dikeluarkan," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/6).

Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.

"Keputusan itu tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pinangki," kata Ketut.

Pinangki terbukti melakukan tiga tindak korupsi, yakni menerima suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dengan

tersangka Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya, untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2020 lalu.

Sementara itu, mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. AKBP Raden Brotoseno, walau telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebesar Rp1,9 miliar, dari proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2016, setelah selesai menjalani masa hukumannya, diduga kembali aktif menjadi penyidik Bareskrim Polri. Sebab yang bersangkutan tidak pernah dipecat dari dinas kepolisan.

Hakim pengadilan memvonis Brotoseno selama lima tahun penjara dan dinyatakan bebas pada 15 Februari 2020 lalu. Setelah dinyatakan bebas, Brotoseno kembali bertugas di kepolisian karena hasil sidang kode etik memutuskan tidak memecat Brotoseno sebagai anggota Polri.

Berdasarkan hasil sidang kode etik yang dibagikan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Raden Brotoseno tidak dipecat dari Polri karena memiliki prestasi berdasarkan pernyataan dari atasannya.

Brotoseno diberi sanksi untuk meminta maaf kepada atasan dan mendapat rekomendasi untuk dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi. ● han



DIALOG KEBANGSAAN DPD

Mantan anggota DPR Akbar Faisal (kedua kiri) memberikan paparan disaksikan anggota Kelompok DPD di MPR Fahira Idris (kiri), pakar Hukum Tata Negara Fitra Arsil (kedua kanan) dan Staf Khusus Ketua DPD Jamal Aziz (kanan) saat diskusi kebangsaan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). Diskusi itu membahas haluan negara tanpa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prabowo Sangat Terharu saat Bertemu Istri Almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar

JAKARTA (IM) - Momen penuh haru terjadi saat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan para purnawirawan TNI saat acara halal bihalal yang digelar di kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Purnawirawan yang hadir diantaranya yakni Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar yang pernah menjadi komandan jenderal Kopassus, panglima Kodam, gubernur Lemhannas, Menteri Perhubungan, Menko Polso-kam, dan sekarang Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI).

Hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2002-2005 Laksamana TNI (Purn.) Bernard Kent Sondakh, Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2008-2009 Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2009-2012 Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat.

"Saya sangat terharu. Saya sangat merasa sangat-sangat dihormati. Karena hadirnya begitu banyak senior saya. Begitu banyak panutan saya, pembina saya, mentor saya, mantan-mantan komandan saya," ujar Prabowo Subianto, Kamis (2/6).

Adapun dalam kesempatan ini hadir Ibu Hardjanti Wismoyo Arismunandar yang merupakan istri dari mantan komandan Prabowo, almarhum Jenderal TNI (Purn.) Wismoyo Arismunandar.

Wismoyo adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 1993 sampai 1995 dan Pangkostrad periode 1990 sampai dengan 1993.

Kedatangan Ibu Hardjanti ini pun membuat Prabowo terharu.

"Terutama hadir di sini Ibu asuh kita. Ibu komandan saya, Ibu Hardjanti Wismoyo Arismunandar," kata Prabowo sambil menahan air mata.

Selain itu, hadir mantan Danjen Kopassus, Panglima Kodam, dan Panglima Kostrad Letnan Jenderal (Purn.) M Tarub beserta istri, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Mayor Jenderal TNI (Purn.) Saiful Sulun, dan Gubernur Sulawesi Utara ke-11, Menteri Perhubungan, Menteri PAN RB, Wakil Ketua MPR RI tahun 2014-2019 Letnan Jenderal TNI (Purn.) Evert Ernest Mangindaan.

"Hadir di sini beberapa mantan Panglima Kostrad, beberapa mantan Pangdam, beberapa mantan Danjen Kopassus, beberapa Panglima Armada, beberapa Panglima Operasi Angkatan Udara, para mantan Komandan Pasukan dari Pelaut Penerbang dan seluruh purnawirawan yang saya banggakan," tutur Prabowo Subianto.

Adapun meski tidak bisa hadir dalam reuni tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn.) Subagyo Hadi Siswyo mengirimkan video menyapa Prabowo dan para purnawirawan.

Subagyo HS adalah mantan komandan Prabowo yang merupakan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang menjabat pada September 1994 hingga Desember 1995, yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI periode pertama Presiden Joko Widodo. ● mei

Koordinator Keuangan PT Nindya Karya Diperiksa KPK Terkait Korupsi Proyek Jalan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Koordinator Keuangan Divisi Properti PT Nindya Karya, Fahd Muazzaz alias Anjas, Kamis (2/6).

Anias diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Bengkalis, Riau.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka MNS (M Nasir)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (2/6).

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap Anjas. Hanya saja, belakangan ini penyidik memang sedang intens mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Pun demikian berkaitan aliran uang terkait korupsi proyek jalan ini.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan sepuluh orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Kesepuluh orang itu, yakni M. Nasir (MNS) selaku Pe-

jabat Pembuat Komitmen (PPK); Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian, delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiyet Hadiano, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

Perkara ini bermula ketika tahun 2013 dilakukannya tender terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek

sebesar Rp2,5 triliun. Proyek tersebut diantaranya, peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sci Pakning.

Selanjutnya, proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil; proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis; proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri; dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

Kesepuluh tersangka itu diduga telah melakukan per-

buatan melawan hukum terkait empat proyek ini. Diantaranya, terkait pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang kualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan.

Atas perbuatannya, 10 tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han



RAKER DPR DENGAN KEMENPAREKRAF

Menparekraf Sandiaga Uno mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). Rapat tersebut membahas RKA-K/L dan RKP K/L Kemenparekraf Tahun 2023.

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGESAHAN RENCANA PERDAMAIAAN (HOMOLOGASI) DAN PENGAKHIRAN KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	
Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Putusan Nomor: 71/Pdt.Sus-PKU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 12 Mei 2022, telah mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Rimba Raya Lestari dalam proses PKPU, dengan amar putusan sebagai berikut:	
MENGADILI:	
1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah disetujui oleh PT RIMBA RAYA LESTARI dan Para Kreditor;	
2. Menyatakan PT RIMBA RAYA LESTARI dan Para Kreditor untuk tunduk dan menaati serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Mei 2022;	
3. Menyatakan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT RIMBA RAYA LESTARI berakhir dengan segala akibat hukumnya;	
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan diatur tersendiri dalam Penetapan setelah Putusan ini;	
5. Menghukum PT RIMBA RAYA LESTARI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu Rupiah).	
Pengumuman ini merupakan pelaksanaan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai pemberitahuan kepada Debitor dan Para Kreditor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk menjalankan, melaksanakan, dan mematuhi Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Mei 2022.	
Demikian Pengumuman ini dibuat, agar menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan.	
Jakarta, 3 Juni 2022	
(dahulu) Tim Pengurus PT RIMBA RAYA LESTARI (Dalam PKPU) td Andhika Putera Perdana, S.H., C.LA	td Ramahni Limanto, S.H., M.H

PENGUMUMAN	
Bahwa akan dilakukan pengembalian hak lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam PT STAR PROSPERITY PARTNERS, berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan").	
Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat di Kawasan Duta Indah Iconic Tower C, RT 04, RW 02, Pangeranggunan Utara, Pinang, Kota Tangerang.	
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Tangerang, 03 Juni 2022	
Direksi Perseroan	
Catatan : - rancangan pengembalian dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.	

PENGUMUMAN AKUISISI	
PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL	
PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan: Bahwa PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL akan melakukan pelepasan 100% saham nya kepada pihak ketiga.	
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitan dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada pengurus perseroan dengan alamat koresponden:	
PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL Jalan angkur No.22, Kel. Kayu Putih, Kec. pulo gadung, Jakarta timur, DKI Jakarta. 13210	
Jakarta, 2 Juni 2022	
Direksi	
PT. SAMEH ECA INTERNATIONAL	